

## PEMERINTAH ALOKASIKAN BANTUAN PSU DI PAPUA RP3,7 MILIAR



*sumber gambar: liputan6.com*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan pada tahun 2021 ini akan menyalurkan anggaran bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Provinsi Papua senilai Rp3,7 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut. "Bantuan PSU disalurkan oleh Kemen PUPR agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kemen PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran persnya.

Menurut Khalawi, pembangunan PSU berupa jalan lingkungan sangat membantu mendorong pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah di Papua. Adanya bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong semangat para pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat. Pelaksanaan Bantuan PSU, imbuhnya, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum. Adapun komponen bantuan PSU yang akan dikerjakan adalah jalan lingkungan.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan, target pembangunan Bantuan PSU Perumahan mulai tahun anggaran 2015-2019 selalu memenuhi target bahkan selalu melebihi jumlah unit yang ditargetkan. Capaiannya penyaluran Bantuan PSU tahun 2015 sebanyak 29.956 unit, 2016 sebanyak 26.884 unit, 2017 sebanyak 17.218 unit, 2018 sebanyak 30.406 unit dan 2019 sebanyak 15.148 unit. "Bantuan PSU ini bersifat stimulan dan diberikan agar pelaku pembangunan khususnya

pengembang dapat lebih banyak membangun rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah<sup>i</sup> (MBR) di Papua,” ujar Khalawi.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Ditjen Perumahan Kemen PUPR Faisal Soedarno menerangkan, penyaluran bantuan PSU untuk 395 unit rumah ini dilaksanakan dan tersebar di Kabupaten Jayapura sebanyak 60 unit, Kabupaten Merauke sebanyak 100 unit, serta Kota Jayapura sebanyak 235 unit. "Kami harap bantuan ini dapat mendorong capaian target Program Sejuta Rumah dan mengurangi *backlog* perumahan di Indonesia. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat berpenghasilan rendah di Papua bisa mendapatkan rumah layak huni dengan lingkungan yang lebih berkualitas karena tersedianya PSU yang memadai," jelas Faisal.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/746041/kempupera-alokasikan-bantuan-psu-di-papua-rp-37-miliar>, Senin, 15 Maret 2021.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4507428/pemerintah-anggarkan-rp-37-miliar-bangun-jalan-akses-ke-rumah-subsidi-di-papua>, Selasa, 16 Maret 2021.

#### **Catatan:**

Permen PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum menyatakan:

1. Bantuan PSU adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. (Pasal 1 angka 1)
2. Kelompok sasaran pemberian Bantuan PSU merupakan MBR kelompok sasaran kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi. Pemberian bantuan tersebut, diberikan pemerintah melalui pelaku pembangunan yang membangun perumahan umum dan diutamakan diberikan bagi pelaku pembangunan berskala kecil. (Pasal 4)
3. Tahapan pemberian Bantuan PSU terdiri dari:
  - a. usulan permohonan pemberian Bantuan PSU  
Usulan permohonan bantuan dilaksanakan melalui tahapan Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi dan

Kementerian melakukan verifikasi dan menetapkan Bantuan PSU kepada Pelaku Pembangunan.

b. penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU

Penetapan lokasi perumahan penerima bantuan didahului verifikasi pra konstruksi meliputi pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis serta pemeriksaan lokasi. Penetapan lokasi perumahan penerima Bantuan PSU ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

c. pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU

Pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU melalui penunjukan langsung dilakukan oleh pelaku pembangunan yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau melalui pelelangan umum bagi pelaku pembangunan yang tidak memiliki SBU dan SIUJK. Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Kementerian.

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh konsultan manajemen konstruksi, pengawas lapangan, direksi teknis, dan koordinator wilayah yang ditetapkan Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

d. pelaporan

Dalam pengawasan lapangan pembangunan fisik Bantuan PSU, konsultan manajemen konstruksi menyampaikan laporan mingguan dan bulanan secara berkala dengan disetujui pengawas lapangan dan direksi teknis, serta diketahui koordinator wilayah. Kemudian Direktorat Rumah Umum dan Komersial melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian Bantuan PSU.

(Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24)

---

<sup>i</sup> MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. (Pasal 1 angka 11 Permen PUPR Nomor 38/PRT/M/2015)